

Analisis Tingkat Penerimaan e-Procurement di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Menggunakan Technology Acceptance Model

Dewi Sri Wahyuni*, Aan Julia

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*swahyunidewi81@gmail.com, aan.unisba@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the level of acceptance of technology and Human Resources in the application of e-Procurement in the West Java Provincial Government by using the Technology Acceptance Model with 4 constructs, namely Perceived Easy of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using and Behavioral Intention. The government uses technology to reform administration and public services that are transparent and accountable by creating e-Government. The unpreparedness of human resources in operating e-Procurement affects the effectiveness of e-Government. The population in this study is the Regional Apparatus/Bureau in West Java Province, the sample taken is 100 respondents from the Regional Apparatus/Bureau in West Java. The analysis tool uses Partial Least Square SEM (PLS SEM). Researchers used the SmartPLS 3.0 software. The results of the analysis conclude that Human Resources who use e-Procurement in the West Java Provincial Government have accepted the implementation of e-Procurement because e-Procurement provides great benefits in assisting the work of Procurement of Goods and Services although in its application there are still users who have difficulties.*

Keywords: *Public Service, e-Procurement, TAM, Structural Equation Model.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan teknologi dan Sumber Daya Manusia dalam penerapan e-Procurement di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Technology Acceptance Model dengan 4 konstruk yaitu *Perceived Easy of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using dan Behavioral Intention*. Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk reformasi administrasi dan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas dengan menciptakan e-Government. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan e-Procurement mempengaruhi keefektifan e-Government. Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah/Biro di Provinsi Jawa Barat, sampel yang diambil yakni 100 responden dari Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat. Alat analisis menggunakan *Partial Least Square SEM (PLS SEM)*. Peneliti menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang menggunakan e-Procurement di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah menerima dalam implementasi e-Procurement karena e-Procurement memberikan manfaat yang besar dalam membantu pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa meskipun dalam penerapannya masih ada pengguna yang memiliki kesulitan.

Kata Kunci: *Pelayanan Publik, e-Procurement, TAM, Structural Equation Model.*

A. Pendahuluan

Pemerintah merupakan badan publik yang memiliki peran penting sebagai lembaga penyedia layanan sipil dan jasa-jasa publik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik demi terciptanya *clean and good governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien dan administrasinya bertanggung jawab pada publik (Moento et al., 2019). Pada hakekatnya yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan adalah dengan disediakannya pemberian pelayanan baik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi kepada setiap warga. Fungsi penting pemerintah yaitu sebagai regulasi, proteksi dan sebagai distribusi (Endah, 2018). Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa untuk menunjang optimalnya kegiatan pemerintah (Purba, dkk 2020).

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan diatas perlu dilakukan melalui tender atau pelelangan salah satunya untuk keperluan kantor sehari-hari yang habis dipakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan pergantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, serta pengeluaran bersifat non fisik dalam bentuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Wardhana, 2016). Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari, Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Serah Terima Pekerjaan (Azikin et al., 2021). Melalui tahapan tersebut pengajuan PBJ dirancang setiap tahunnya dalam rencana keuangan yang disusun melalui adanya usulan setiap daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bertujuan untuk meminimalisir hal merugikan seperti kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan dapat dihindari.

Dalam pelaksanaan APBN dan APBD, terdeteksi permasalahan yang seharusnya anggaran tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan lainnya, justru terkuras di dalam kegiatan PBJ yang tidak efektif dan efisien (Rachmania, 2020). Hal tersebut bisa dilihat dari seringnya terjadi perubahan kebutuhan dalam prosesnya terutama dalam rencana anggaran sistem PBJ yang disebut Rencana Umum Pengadaan (RUP). Akibat sering terjadinya perubahan tersebut, peluang tingkat penyimpangan semakin tinggi. Terdapat 30-50% kebocoran APBN dan APBD seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kasusnya di Indonesia, sebuah kajian yang dilakukan Bank Dunia (*Country Procurement Assesment Review*) CPAR menyebutkan bahwa 10–50% pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengalami kebocoran (korupsi) (*World Bank*, 2001).

Mengantisipasi penyimpangan kebocoran itu, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk reformasi administrasi dan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas dengan menciptakan *e-Government*. *E-Government* dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses Informasi publik secara *online* (Sari, 2021). Salah satu contoh penerapan *e-Government* yang telah dilakukan pemerintah Indonesia beberapa tahun belakangan ini adalah melalui *e-Procurement*. Hadirnya *e-Procurement* berhasil menekan biaya menjadi lebih murah, pelayanan publik yang lebih baik serta siklus pengadaan yang lebih pendek (LKPP, 2009). Manfaat dari digunakannya *e-Procurement* di Indonesia adalah semakin baiknya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti yang ditegaskan oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 107. Namun, ternyata dalam penerapan teknologi *e-Procurement* di Indonesia masih ditemukan masalah-masalah krusial yang mempengaruhi keefektifan *e-Government*. Salah satunya yaitu selalu mengalami perubahan/perkembangan pada aplikasinya dari waktu ke waktu yang tidak diiringi oleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan sumber daya atas aplikasi tersebut yang membuat para pelaku pengadaan mengalami kesulitan saat mengoperasikan *e-Procurement* karena kurangnya pelatihan secara berkala (Ada et al., 2020)

Kasus beberapa daerah di Indonesia seperti Bangka Belitung, Kabupaten Banyuasin, Sulawesi Selatan, Jawa tengah, Yogyakarta, dan daerah lainnya memiliki permasalahan dalam pelaksanaan implementasi *e-Procurement* yaitu kinerja para pihak pengelolaan *e-Procurement* masih kurang maksimal. Hal ini karena ketidakpahaman dan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan *e-Procurement*, walaupun sudah diadakan pelatihan namun tetap belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan tingkat efisiensi, Provinsi

Bangka Belitung dalam pelaksanaan *e-Procurement* hanya sebesar 5,77% pada tahun 2012, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai angka 11,44% (Aprizal & Purba, 2013; DP,M.K, 2016; Adrian et al., 2013; Sani et al., 2011; Udoyono, 2012). Bahkan, Kota Surabaya sebagai pelopor pertama yang menerapkan *e-Procurement* sejak tahun 2004 masih mengalami masalah serupa, sehingga terpaksa kembali menggunakan cara-cara manual dalam teknis pelaksanaannya (Novitaningrum, 2014).

Jawa Barat mulai mengimplementasikan *e-Procurement* sejak tahun 2007, bahkan Jawa Barat pernah mendapatkan penghargaan selama 6 tahun berturut-turut dari 2010-2015 (Septiawan, 2018). Suksesnya sistem PBJ berbasis elektronik di Jawa Barat ini ternyata masih belum semua kabupaten/kota yang menggunakan *e-Procurement* sebab terbatasnya keterampilan pada sumber daya manusia sebagai tenaga teknis (Hapiah et al., 2011). Berdasarkan data informasi yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (2021) menyatakan hanya 37% Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat yang sudah mencapai secara penuh sesuai pagu anggaran perubahan bahkan kurang dari 50% dari 46 Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat. Penyebabnya antara lain karena terdapat kendala dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta tingkat kesiapan sumber daya manusia untuk memahami teknologi, sehingga ada barang/jasa yang belum atau tidak tepat waktu dalam penginputan ke sistem LPSE serta disebabkan karena proses alur *website e-Procurement* sering dibilang rumit dilihat dari lebih banyak tahapan yang harus dilakukan dibandingkan secara konvensional.

Beberapa dinas kembali menerapkan PBJ secara konvensional atau manual untuk memudahkan penyedia dan pembeli bertemu langsung ketika melaksanakan lelang (Prihastuti, 2015). Maka dari itu ada 29 Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat yang dinyatakan belum sesuai pagu anggaran perubahan karena kendala tersebut. Hal ini membuat beberapa Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat rendah dalam partisipasi penerapan *e-Procurement*. Salah satunya yaitu DISKOMINFO Jawa Barat yang masih kesulitan dalam proses pengolahan data penyedia (Azhar, 2011).

Jika dilihat dari permasalahan yang ada, implementasi *e-Procurement* di Jawa Barat belum berjalan secara efektif karena kurang didukung oleh kesiapan teknologi dan Sumber Daya Manusia. Kami ingin melihat tingkat penerimaan penggunaan teknologi dan Sumber Daya Manusia dalam menerapkan *e-Procurement* di Provinsi Jawa Barat.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan deskriptif, dengan menguraikan fenomena yang terjadi sebelumnya menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM merupakan sebuah model untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi. TAM pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986 dengan memunculkan variabel *Perceived Easy of Use* (Persepsi kemudahan penggunaan) dan *Perceived Usefulness* (persepsi kebermanfaatan). Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1996 oleh Davis bersama Venkateh dengan menambahkan variabel *Attitude Toward Using* (sikap terhadap penggunaan) lalu Gahtani memodifikasi model TAM dengan menambahkan variabel *Behavioral Intention* (kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan).

Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei berupa penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel dari 48 Dinas/OPD Provinsi Jawa Barat di bidang pengadaan barang dan jasa karena dapat mempresentasikan sistem *e-Procurement* di setiap pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaan survei, hanya 27 Dinas/OPD yang bersedia sebagai partisipan dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan ketentuan sebagai pengguna *e-Procurement*, sesuai dengan syarat pengolahan data menggunakan PLS SEM yaitu 30-100 ukuran (Chin, 2000). Kemudian untuk memperdalam hasil analisis dilakukan wawancara kepada 14 Dinas/OPD.

Analisis Data

Data di analisis menggunakan *Partial Least Square SEM* (PLS SEM). PLS SEM merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara langsung maupun tidak langsung. Kelebihan menggunakan PLS SEM yaitu sampel yang digunakan boleh sedikit serta tidak memerlukan data dengan distribusi normal (Sitorus et al., 2015). Adapun data yang digunakan dengan PLS SEM melalui kuesioner yang telah disebarakan sebelumnya dengan skala *likert* 1-5.

Tahap Analisis

Validitas dan Reliabilitas (*Outer Model*)

1. Untuk melakukan pengujian validitas dilihat melalui nilai *loading factor* dari masing-masing indikator. Nilai *loading* harus diatas 0,70 supaya memenuhi syarat validitas berdasarkan nilai *loading*. Namun, untuk sistem yang masih dalam pengembangan, *loading factor* dapat dipertahankan pada nilai antara 0,50 dan 0,60
2. Selanjutnya dilakukan pengujian validitas berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan reliabilitas berdasarkan *Cronbachs Alpha*, *Composite Reliability*. Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sebagai konstruk atau variabel ukuran selalu bertindak sebagai ukuran nyata dari pengukuran struktural.
3. Pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan *Fornell-Larcker*, diukur melalui nilai akar kuadrat AVE dari suatu variabel laten, kemudian dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dan variabel laten lainnya.

Inner Model

1. Merancang inner model
2. Perancangan inner model yang dibentuk berdasarkan model dari konstruk penelitian seperti yang terlihat di gambar 2.
3. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan hasil perhitungan melalui bootstrapping SmartPLS. Bootstrapping merupakan pendekatan non parametric untuk mengestimasi ketepatan dari estimasi Partial Least Square (Chin, 2000).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tahap analisis pada penelitian ini dilakukan dengan membuat diagram jalur dan melakukan analisis PLS-SEM untuk menguji pengaruh antar variabel dan pengaruh indikator terhadap variabel latennya, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Analisis awal pada PLS-SEM sebelum pengujian hipotesis guna memprediksi hubungan antar variabel laten dalam *inner model*, terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap *outer model*.

Evaluasi *Outer Model*

Outer Model merupakan model yang menghubungkan variabel latent dengan indikator-indikator pertanyaan. Pengujian *outer model* dilakukan dengan melihat nilai validitas, reliabilitas konstruk dan *Average Variance Extracted* (AVE).

Tabel 1. *Outer Model* PLS SEM

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
ATU	0,916	0,959	0,922
BI	0,919	0,961	0,925
PEOU	0,829	0,892	0,733
PU	0,936	0,959	0,887

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Setelah diestimasi, pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa model dapat dilakukan evaluasi ke tahap selanjutnya dikarenakan pada eksekusi nilai korelasi pada tiap-tiap indikator

memiliki *loading factor* dan nilai *Cronbachs alpha* > 0.7 dari setiap konstruk, yang berarti telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Evaluasi Inner Model

Evaluasi inner model berfungsi untuk mengevaluasi hubungan antar variabel laten. Evaluasi ini meliputi signifikansi hubungan jalur sebagaimana yang dihipotesiskan dan melihat nilai *R-Square*. Evaluasi hubungan jalur dilihat berdasarkan *path coefficients*. Berikut hasil dari analisis *bootstrapping PLS SEM*:

Tabel 2. Bootstrapping Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O /STDEV)	P Values
ATU -> BI	0,330	0,326	0,147	2,240	0,026
PEOU -> ATU	0,354	0,350	0,117	3,032	0,003
PEOU -> PU	0,302	0,313	0,114	2,655	0,008
PU -> ATU	0,379	0,371	0,135	2,803	0,005
PU -> BI	0,430	0,442	0,154	2,800	0,005

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Penelitian ini dinyatakan diterima karena nilai P-Values < 0.05 dan nilai T-Statistik semua hipotesis > 1,645.

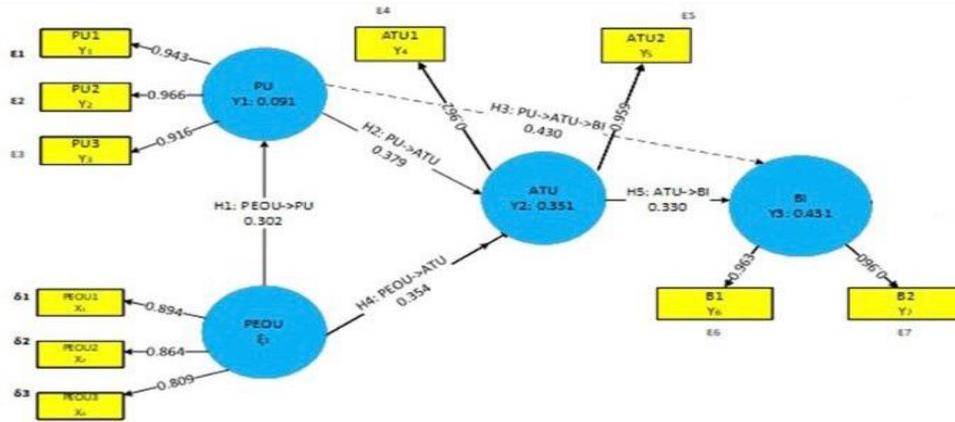
Tabel 3. Koefisien Determinasi

	R Square
ATU	0,351
BI	0,431
PU	0,091

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Evaluasi selanjutnya terhadap *inner model* dengan melihat nilai *R-Square* pada konstruk endogen pada penelitian. Berdasarkan hasil pada Tabel 3, Nilai *R-Square* dari ATU adalah 0,351, yang berarti PU dan PEOU mampu mempengaruhi ATU sebesar 35,1%. Sementara nilai *R-Square* dari BI adalah 0,431, yang berarti PU dan ATU mampu mempengaruhi BI sebesar 43,1%. Nilai *R-Square* dari PU adalah 0,091, yang berarti PEOU mampu mempengaruhi PU sebesar 9,1%.

Tahap analisis selanjutnya yaitu menganalisis diagram jalur yang telah diolah dengan *SmartPLS* untuk mengetahui hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung. Berikut merupakan diagram jalur yang merepresentasikan *outer model* dan *inner model*.

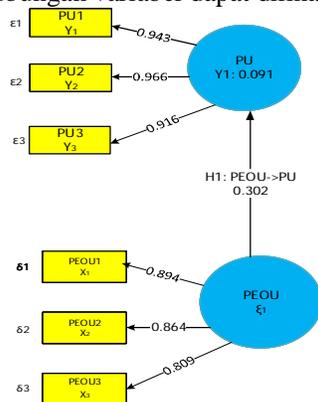


Gambar 1. Diagram Jalur *Outer Model* dan *Inner Model*

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Pengaruh *Perceived Ease of Use (PEOU)* terhadap *Perceived Usefulness (PU)*

Ditengah keberhasilan *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, faktanya masih terdapat kendala yang dirasakan oleh pengguna khususnya pada persepsi kemudahan (PEOU). Pada tabel 5 menunjukan bahwa PEOU terhadap PU memiliki pengaruh langsung paling kecil yaitu 0,302. Sesuai dengan masih banyaknya keluhan mengenai teknis pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diperkuat dengan hasil kuesioner bahwa 56% pengguna merasa kesulitan mengoperasikan *e-Procurement*. Kemudian berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa mayoritas pengguna merasakan kesulitan diantaranya mereka sulit dalam mempelajari modul *e-Procurement* akibatnya akan mempengaruhi pemahaman pengguna sistem tersebut. Kesulitan lainnya yaitu sering terjadi *server down* ketika mencapai batas waktu penyerahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga semakin banyak tahapan yang harus dilakukan membuat beberapa Dinas/OPD mengalami keterlambatan dalam penyerahannya. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:

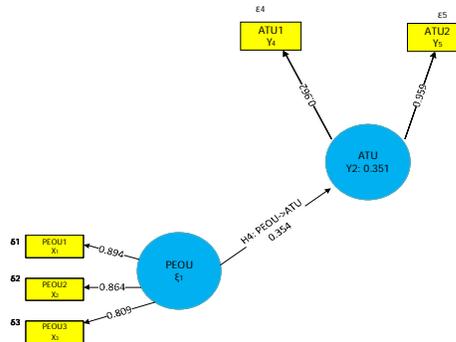


Gambar 2. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PEOU -> PU)

Pengaruh *Perceived Ease of Use (PEOU)* Terhadap *Attitude Toward Using (ATU)*

Dalam mempertimbangkan keputusan untuk menggunakan system *e-Procurement* dilihat dari kesulitan yang dirasakan pengguna yang akan mempengaruhi sikap sebesar 0.354 lebih kecil dari hubungan PU terhadap ATU. Artinya, persepsi kemudahan masih rendah dalam

mempengaruhi sikap pengguna, namun jika dilihat dari manfaat maka pengguna akan mempertimbangkan untuk tetap menggunakan system. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa kesulitan dan pemanfaatan yang belum optimal seperti harga yang diajukan penyedia terlalu mahal dan masih sedikitnya vendor yang tersedia pada aplikasi *e-Procurement* membuat pengguna memilih belanja diluar aplikasi dan melakukan pencatatan secara manual. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan maka akan mempengaruhi sikap pengguna dalam menggunakan *e-Procurement*. Seiring seseorang menyadari adanya manfaat pada sebuah system maka akan menunjukkan wujud nyata adopsi layanan ini dengan terus menggunakannya untuk berbagai transaksi barang/jasa secara *online*. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:

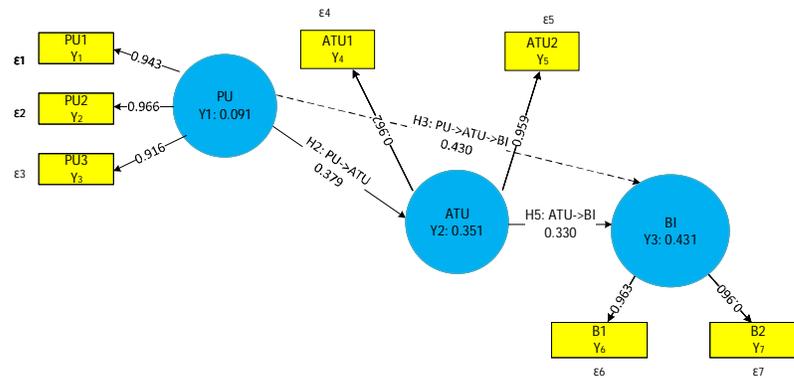


Gambar 3. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PEOU -> ATU)

Pengaruh *Perceived Usefulness* (PU) Terhadap *Attitude Toward Using* (ATU) melalui *Behavioral Intention* (BI).

Pengguna tetap memilih menggunakan *e-Procurement* karena secara sistem pengguna dipaksakan untuk bisa menggunakannya meskipun tidak mempertimbangkan ketertarikan pengguna terhadap system, terlihat pada gambar 6 bahwa pengaruh ATU terhadap BI sebesar 0,330 lebih kecil dibanding pengaruh PU terhadap BI melalui ATU sebesar 0,379 yang artinya terdapat hubungan tidak langsung. Sikap seseorang dalam menggunakan sistem akan mempengaruhi ketertarikan pengguna terhadap sistem tersebut. Ketika terjadi masalah dalam penggunaan *e-Procurement* maka akan membuat pengguna mempertimbangkan sikapnya untuk menggunakan sistem tersebut karena rasa ketertarikan akan meningkat jika pengguna terbebas dari masalah penggunaan.

Menurut informan dari hasil wawancara secara mendalam, pengguna *e-Procurement* kehilangan minat menggunakan *e-Procurement* karena proses pengajuan dan persetujuan untuk pemesanan barang/jasa memakan waktu cukup lama, sementara pengguna membutuhkan barang/jasa lebih cepat serta tidak semua barang yang dibutuhkan tersedia di *e-Procurement*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu Pejabat PBJ, beliau berpendapat bahwa ada kekurangan saat belanja secara *online* karena spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ada di *e-Procurement* sehingga ada rasa ketidakpuasan yang menyebabkan pengguna memilih belanja secara *offline*. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PU -> ATU -> BI)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tingkat penerimaan pengguna *e-Procurement* di Dinas/OPD Provinsi Jawa Barat yang diukur menggunakan model TAM (*Technologi Acceptance Model*) diantaranya variabel *Perceived Easy of Use* (PEOU), *Perceived Usefulness* (PU), *Attitude Toward Using* (ATU), *Behavioural Intention* (BI), menunjukkan pengaruh yang paling besar yaitu *Perceived Usefulness* (PU) terhadap minat perilaku untuk menggunakan (BI) melalui *Attitude Toward Using* (ATU).

Penerimaan *e-Procurement* di pemerintah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh persepsi manfaat. Dalam hal ini pengguna *e-Procurement* mempunyai persepsi bahwa *e-Procurement* sulit digunakan namun karna *e-Procurement* memberikan manfaat yang besar sehingga pengguna bisa menerima system *e-Procurement* dalam membantu pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dan efektif.

Acknowledge

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih terhadap pihak-pihak yang sudah memberi dukungan, bantuan, upaya untuk mendorong dan mendukung penulis untuk mengumpulkan data dan mencari informasi dalam terlaksananya penelitian penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “Analisis Tingkat Penerimaan *e-Procurement* di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Menggunakan *Technology Acceptance Model*” sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat kelulusan sarjana. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing Aan Julia, S.E., M.Si. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
2. Keluarga penulis yang selalu memberi dukungan disertai doa yang tulus.
3. Sarah Hana Fitriyah sebagai partner dalam penulisan yang selalu semangat dan tidak pernah menyerah serta memberi motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ada, Y., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2020). Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan *e-Procurement* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 11(2).
- [2] Adrian, R., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2013). Implementasi Pelaksanaan *E-Procurement* Dengan Prinsip-prinsip *Good Governance* Di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 263-272.
- [3] Aprizal, A., & Purba, J. R. T. (2013). Akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkal pinang. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 15-28.

- [4] Azhar, F. (2011). *E-Procurement* Berbasis Intranet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- [5] Azikin, A., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan *Probit Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ada Na Gau:Public Administration*, 2(1), 481- 490.
- [6] Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). Dokumen Input SIRUP Perubahan
- [7] Chin WW. 2000. *Partial Least Squares for Researcher: An Overview and Prosentation of Recent Advances Using the PLS Approach*, <http://disc-nt.cba.uh.edu/chin/icis96.pdf> [20 Maret 2022].
- [8] Davis, Fred D. 1986. "Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly*, September, vol.13, No.3 p.319-340 dalam <http://www.jstor.org>
- [9] DP, M. K. (2016). Pengaruh Pimpinan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Di Kabupaten Banyuwasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(2), 44-51.
- [10] Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141-151.
- [11] Gahtani, S.A. 2001. "The Applicability of TAM Outside North American: an Empirical Test in United Kingdom." *Information Resource Management Journal*, p.37-46.
- [12] Hapijah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement Government*) Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 8(1), 05.
- [13] Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). *Good governance*. Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10-16.
- [14] Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement (Best Practice* di Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN.
- [15] Prihastuti, N. E. (2015). Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (*E-Procurement*) Di Dinas Pekerjaan Umum. Provinsi Papua (Doctoral dissertation, Institut Technology Sepuluh Nopember).
- [16] Purba, H. R. C., & Arifin, Z. (2020). Implementasi Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 64-71.
- [17] Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist- Diction*, 3(3), 1123-1152.
- [18] Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- [19] Sani, A. (2011). Evaluasi Penerapan *E-Procurement* pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).
- [20] Sari, D. R. (2021). Pengaruh Dimensi Budaya Terhadap Tingkat Penerimaan Masyarakat Pada Layanan *E-filling: Analisis Technology Acceptance Model (TAM)*. *JST (Jurnal Sains Terapan)*, 7(2), 7-14.
- [21] Septiawan, B. (2018). Keberhasilan implementasi sistem *E-Procurement* pada Pemerintah Daerah se- Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 23-40.
- [22] Sitorus, E., Rosidi, A., & Sunyoto, A. (2015). Analisis dan Evaluasi *User Acceptance* terhadap Penerapan *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *ComPutarE: Jurnal Ilmiah Information Technology*, 3(1),

10-23.

- [23] Udoyono, K. (2012). *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).
- [24] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test. *Decision sciences*, 27(3), 451-481.
- [25] Wardhana, P. H. K. (2016). Pelaksanaan Administrasi Pengeluaran Kas Untuk Alat Tulis Kantor (Atk) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
- [26] World Bank. 2001. Indonesia Country, Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement System. Jakarta: East Asia and Pacific Region Operational Services Unit World Bank Office.
- [27] Anggraeni, Muthia. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Keunggulan Produk terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat Bandung*. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 59-64.